

**PERAN UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN AFGHANISTAN
(UNAMA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI
MANUSIA DI AFGHANISTAN PADA TAHUN 2009-2012**

Oleh:

Ahmad Fuadi

(ahmadfuadinst@gmail.com)

Pembimbing: Faisyal Rani, S.IP, MA

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28293– Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research analyzes the role of United Nations Mission (UNAMA) on protecting the human rights in Afghanistan, especially during 2009 until 2012. Afghanistan is well known with its conflicts. Since the departure of Soviet Union in 1989, Afghanistan has fallen into civil wars. Many groups tried to take the seat of government until the Taliban rose. The Taliban became the most powerful group in Afghanistan until its major defeat in 2002 by Anaconda Operation of United States and its allies. UNAMA has been playing a positive role in Afghanistan since its formation in 2002. In realizing its goal to protect human rights staying respected as mandated in the United Nations' Charter, UNAMA is supported by human rights unit. UNAMA is also supported by other international organizations. UNAMA made four priority areas of work in protecting human rights. They are protection civilian, violence against women, peace and reconciliation (transitional justice and impunity), and detention. The datas were collected from many sources like books, journals, and websites that can support this research. In this research, the reseacher uses pluralism perspective to describe the role of UNAMA in Afghanistan. This research is supported by international organization theories. Humanitarian assistance concept is also provided to support this research.

Keywords : UNAMA, Taliban, conflict, human rights, international organization humanitarian assistance.

Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai peran dari UNAMA dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia di Afghanistan pada tahun 2009-2012. Afghanistan merupakan sebuah negara yang terletak di bagian selatan dari Benua Asia. Letak Afghanistan sangat strategis karena dikelilingi oleh negara-negara yang terletak di kawasan

Timur Tengah, Asia Tengah, dan Asia Timur. Afghanistan merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku dan budaya. Namun, letak Afghanistan yang strategis serta keanekaragaman suku dan budaya tidak menjadi faktor pendukung Afghanistan untuk menjadi sebuah negara yang kuat dan disegani. Afghanistan telah membuat sejarah konflik yang berkepanjangan, bahkan hingga saat ini.

Kondisi konflik yang berkepanjangan ini telah memberikan dampak negatif yang sangat besar terhadap pertumbuhan Afghanistan.¹

Konflik yang terjadi di Afghanistan tidak hanya membuat kerusakan infrastruktur namun juga telah melumpuhkan berbagai segi kehidupan baik ekonomi, politik maupun sosial dan budaya. Kondisi konflik di Afghanistan telah menarik perhatian negara-negara lain untuk ikut membantu menyelesaikan konflik negara tersebut. *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA) merupakan misi politik yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB.

Konflik di Afghanistan telah berlangsung sejak dahulu. Dalam perjalanan konflik di Afghanistan, terdapat sebuah hal yang penting, yaitu Revolusi Saur pada tahun 1978. Revolusi ini menggulingkan sistem pemerintahan monarki yang menjadi sistem pemerintahan di Afghanistan sebelumnya.

Revolusi Saur ini berupaya untuk menerapkan agenda dan paham sosialis di Afghanistan. Terdapat beberapa agenda seperti menjadikan Afghanistan sebagai negara yang Atheis, mereformasi tanah negara, dan agenda mengenai kesetaraan gender.² Namun, agenda penerapan nilai-nilai sosialis ini ditentang oleh sekelompok masyarakat Afghanistan yang dikenal dengan kelompok Mujahidin. Kelompok ini kemudian meluncurkan serangan-serangan untuk menggulingkan pemerintahan yang berhaluan Marxist-Leninisme.

Ideologi Sosialisme masih bertahan dengan dukungan Uni Soviet di Afghanistan hingga tahun 1990. Namun, pada tahun 1992 seiring setelah runtuhnya Uni Soviet, paham sosialis-komunis pun ikut runtuh di Afghanistan. Melalui *Peshwar Accord*, Afghanistan menyatakan bahwa Afghanistan menjadi Negara Islam.³ Hal ini mendapat banyak penolakan dari kelompok masyarakat di Afghanistan yang kemudian menyebabkan perang saudara terjadi di Afghanistan. Perang saudara yang terjadi telah

menyebabkan Afghanistan kehilangan kesempatan untuk melakukan rekonstruksi pasca mundurnya Uni Soviet dari Afghanistan. Lebih lanjut, konflik tersebut membuat Afghanistan terus tumbuh menjadi negara yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Pada awal tahun 1990, sebuah kelompok milisi mulai muncul sebagai kekuatan politik dan agama di Kandahar. Kelompok ini dikenal dengan nama Taliban. Taliban dipimpin oleh Mohammed Omar. Taliban mendapat banyak dukungan dari pengungsi Afghanistan di Pakistan. Pengakuan terhadap Taliban semakin hari semakin meningkat. Hal ini membuat Taliban berhasil menguasai sebagian besar Afghanistan bagian selatan dan tengah.⁴

Taliban berhasil merebut kekuasaan di pemerintahan Afghanistan pada tahun 1996. Taliban kemudian menerapkan norma-norma agama dan sosial yang sangat ketat di Afghanistan. Seorang tokoh bernama Osama bin Laden muncul sebagai seorang tokoh penting bagi kubu Taliban. Osama bin Laden merupakan tokoh yang ikut berjuang bersama pejuang Mujahidin ketika Uni Soviet masih menguasai Afghanistan. Atas bantuan dari Osama bin Laden, Taliban tumbuh menjadi sebuah kelompok yang kuat dan mendapatkan bantuan dana yang cukup banyak dari rekanan Osama bin Laden.⁵ Sebuah peristiwa penting terjadi pada 11 September 2001. Gedung *World Trade Center* (WTC) runtuh akibat sebuah serangan udara. Amerika Serikat (AS) kemudian menuduh Taliban terlibat dalam hal ini dan menilai Osama bin Laden adalah orang yang harus bertanggungjawab dalam hal ini. Amerika Serikat meminta Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden, namun Taliban menolaknya. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat melakukan operasi militer di Afghanistan. Operasi militer Amerika Serikat ini didasari oleh perlawanan melawan aksi terorisme.

Perang saudara dan serangan-serangan dari AS dan sekutunya dalam rangka menumpas pemberontakan dari kelompok Taliban semakin memperparah kondisi di Afghanistan. Implementasi dari rencana rekonstruksi dan

¹Insight on conflict, *Afghanistan : Conflict profile*, terdapat pada <http://www.insightonconflict.org/conflicts/afghanistan/conflict-profile/>, diakses pada 10 November 2013 pukul 19.45 WIB

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

pemberian bantuan kemanusiaan di Afghanistan mulai menjadi kenyataan setelah Afghanistan bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tanggal 5 Desember 2001 perwakilan pemerintah Afghanistan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menandatangani Perjanjian Bonn. Pada tanggal 22 Desember 2001, pemerintahan sementara Afghanistan dibentuk dan Hamid Karzai dipercaya menjadi pemimpin negara. Ini merupakan sebuah hal yang progresif dalam sejarah Afghanistan yang sedang dilanda konflik.⁶

United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) dibentuk atas permintaan pemerintahan Afghanistan dan merupakan sebuah misi politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Afghanistan. UNAMA bertujuan untuk membantu meletakkan dasar-dasar perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan di Afghanistan. UNAMA didirikan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1401.⁷ Mandat dari Dewan Keamanan PBB diperbaharui setiap tahun tergantung pada kebutuhan dari negara penerima bantuan. Mandat ini telah diperpanjang pada tahun 2013 melalui resolusi 2096.⁸

Berdasarkan informasi dari situs resmi UNAMA, UNAMA melakukan berbagai bentuk kegiatan seperti bantuan masalah politik, bantuan humaniter, hak asasi manusia, dan kerjasama regional. Tujuan utama dari UNAMA adalah untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan. UNAMA telah terlibat dalam upaya mewujudkan perdamaian di berbagai bidang. UNAMA juga berperan penting dalam membantu Afghanistan melalui transisi politik dan membangun kembali integritas Afghanistan.⁹

⁶ Rhoda Margesson, *United Nations Assistance Mission in Afghanistan: Background and Policy Issues*, CRS Report for Congress, 2010, hal. 5

⁷ UNAMA, *mandate*, pada <http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12255&language=en-US>, diakses pada 25 Oktober 2013 pukul 19.50 WIB

⁸ *Ibid.*

⁹ Iselin Hebbert Larsen, *UNAMA in Afghanistan Challenges and Opportunities in Peacemaking : State-building and Coordination*, The Norwegian Institute of International Affairs, 2010, hal. 11.

UNAMA terkhususnya yang bergerak di bidang hak asasi manusia juga mempunyai peran yang besar dalam meminimalisir dampak dari konflik bersenjata terhadap warga sipil. Hal ini dapat diimplementasikan melalui pemantauan independen dan tidak memihak, dokumentasi dan pelaporan insiden yang melibatkan hilangnya nyawa atau korban luka sipil, kegiatan advokasi untuk memperkuat perlindungan warga sipil yang terkena dampak konflik bersenjata, dan inisiatif untuk mempromosikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia, dan konstitusi Afghanistan antara semua pihak dalam konflik. UNAMA juga berperan dalam mendokumentasikan dan mengeluarkan pernyataan dan laporan publik secara sistematis tentang perlindungan terhadap warga sipil dan korban sipil.

Teori Organisasi Internasional dan Peran Organisasi Internasional

Menurut Cheever dan Haviland, Organisasi Internasional adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala.¹⁰ Jika dilihat dari keanggotaannya, Clive Archer menjelaskan bahwa terdapat beberapa bentuk organisasi internasional, yaitu IGO (*Intergovernmental Organization*) dan INGO (*International Non-Governmental Organization*). IGO adalah organisasi internasional yang keanggotaannya terbuka hanya untuk negara-negara dan otoritas pengambilan keputusan diserahkan kepada perwakilan dari pemerintahan, sedangkan INGO adalah organisasi internasional yang mana keanggotaannya terbuka terhadap aktor-aktor transnasional non-negara.¹¹

Ketika berbicara tentang peran organisasi internasional, Clive Archer dalam bukunya *International Organizations* menjelaskan bahwa

¹⁰ John Baylis dan Steven Smith, *The Globalization of World Politics; An Introduction to International Relations*, second edition, (New York : Oxford University Press, 2001), hal. 375

¹¹ Clive Archer, *International Organizations*, (London: Routledge, 2001), hal. 63

organisasi internasional mempunyai tiga peran penting, yaitu:¹²

1. Sebagai Instrumen, organisasi internasional digunakan untuk mencapai tujuan dari politik luar negeri dari sebuah negara. Hal ini biasanya terjadi pada IGO yang mana tindakan-tindakan yang akan diambilnya dapat dibatasi oleh negara yang tergabung didalamnya. Sedangkan dalam INGO, tindakan-tindakan yang akan diambilnya dapat dipengaruhi oleh anggotanya seperti kelompok perdagangan, organisasi bisnis, partai politik, atau kelompok keagamaan.
2. Sebagai Arena, organisasi internasional memiliki peran sebagai arena atau tempat untuk bertemunya anggota-anggotanya untuk membahas permasalahan yang sedang berkembang. Organisasi internasional dapat menjadi tempat untuk berdiskusi, berdebat, bekerjasama, atau bahkan saling berbeda pendapat.
3. Sebagai aktor independen, hal ini berarti organisasi internasional dapat membuat keputusan sendiri tanpa dapat intervensi dari pihak luar. Organisasi internasional dapat menjalankan kebijakannya yang mana kebijakannya dapat menimbulkan kesepakatan atau ketidaksepakatan antar negara-negara anggotanya. Hal dapat dicontohkan seperti IGO.

PBB adalah sebuah organisasi internasional saat ini. Dalam pengoperasiannya, PBB dibantu oleh badan-badan operasi untuk menciptakan perdamaian dengan cara menjaga keamanan internasional dalam sistem internasional serta nilai-nilai kemanusiaan, termasuk permasalahan di Afghanistan.

Hasil dan Pembahasan

Struktur Organisasi UNAMA

UNAMA dipimpin oleh seorang Perwakilan Khusus Sekretariat Jenderal PBB, perwakilan khusus ini dibantu oleh deputi-deputi yang mengurus bidang masing-masing dibantu oleh organ-organ yang mendukung

tujuan dari UNAMA. Perwakilan Khusus Sekretariat Jenderal ini bertanggungjawab kepada Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal PBB. Ia wajib membuat laporan secara berkala terhadap situasi yang sedang berkembang di wilayah yang terjadi konflik

Dalam menjalankan misinya, UNAMA memiliki 2 pilar operasional. Pilar pertama adalah urusan politik. Pilar ini merupakan bagian yang mengurus permasalahan politik. Bidang ini dibagi menjadi beberapa unit kerja seperti unit pemerintahan, unit penegakan hukum, unit bantuan pemilihan umum, unit penasehat militer, dan unit penasehat kepolisian. Pilar kedua adalah bagian yang mengurus proses rekonstruksi dan pengembalian stabilitas infrastruktur di Afghanistan. Bagian ini merupakan bidang yang membantu dalam mengkoordinasikan seluruh badan yang berupaya untuk membangun kembali Afghanistan. Bagian ini juga dibantu oleh beberapa unit kerja, seperti unit hak asasi manusia, unit koordinator pemberi bantuan, penasehat khusus bidang pembangunan, dan bagian-bagian penting lainnya. Di samping itu, UNAMA juga dibantu oleh badan-badan kerja lain seperti, bidang hak asasi manusia, bidang keamanan, dan bagian komunikasi dan publikasi.¹³

Kemunculan Kelompok Taliban

Pasca turunnya Najibullah sebagai pemimpin di Afghanistan, partai-partai baru bermunculan. Partai-partai kecil ini mayoritas dipimpin oleh pejuang yang dulunya merupakan pejuang anti-Soviet. Pemimpin dari salah satu partai kecil yaitu Front Nasional Kemerdekaan Afghanistan, Sibghatullah Mojadedi menjadi Presiden Afghanistan selama April hingga Mei 1992. Namun, atas dasar kesepakatan partai-partai besar di Afghanistan, Rabbani menjadi Presiden sejak Juni 1992 hingga Desember 1994.¹⁴ Ia kemudian menolak untuk mundur ketika masa jabatannya berakhir dengan alasan akan memecah persatuan di Afghanistan apabila belum ada pengganti yang jelas. Pernyataannya

¹³ Rhoda Margesson, *Op. Cit.*, hal. 22

¹⁴ Kenneth Katzman, *Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy*, CRS Report, 2014, hal. 4

¹² *Ibid*, hal. 68

ini mendapat penolakan yang keras dari beberapa pemimpin partai lainnya.

Salah satu penentang sikap dari Rabbani adalah partai *Hezbi Islami*. Partai ini dipimpin oleh Gulbuddin Hikmatyar. Ia merupakan berasal dari kelompok Pashtun. Hikmatyar dan beberapa faksi-faksi sekutu lainnya berupaya untuk menurunkan Rabbani. Oleh karena itu, peperangan pun tidak bisa dihindari. Hikmatyar dan sekutunya menyerang kota Kabul yang menjadi pusat kekuatan dari Rabbani. Peperangan membuat sisi barat kota Kabul mengalami kerusakan yang sangat parah. Dengan kekalahan ini, Rabbani memberikan Hikmatyar posisi sebagai Perdana Menteri. Namun, dikarenakan ketidakpercayaan Himatyar terhadap Rabbani, ia tidak menjalankan tugasnya sebagai Perdana Menteri.¹⁵

Pada tahun 1993 hingga 1994, ahli agama dan siswa-siswa Afghanistan membentuk gerakan Taliban. Kelompok ini mayoritas berasal dari etnis Pashtun. Kebanyakan dari mereka telah pindah ke Pakistan untuk belajar di Madrasah atau sekolah Islam. Kelompok Taliban dipimpin oleh Mullah Muhammad Umar yang merupakan seorang pejuang di partai *Hezbi Islami* yang merupakan partai Islam moderat selama perang melawan Uni Soviet.

Proses Taliban Menguasai Afghanistan

Taliban memandang bahwa pemerintahan Rabbani merupakan pemerintahan yang lemah, korup, dan anti-Pashtun. Peperangan terjadi sekitar 4 tahun yaitu tahun 1992 hingga 1996. Pada tahun 1994, Taliban menyerang dan berhasil menguasai kota-kota di bagian selatan Kandahar. Taliban mendapatkan bantuan dari pemimpin-pemimpin lokal yang tidak setia pada pemerintah pusat. Taliban melanjutkan operasi militernya hingga ke kota yang berdekatan dengan Kabul. Taliban juga berhasil menguasai provinsi Herat yang berbatasan langsung dengan Iran dan berhasil memenjarakan gubernurnya, Ismail Khan. Ismail Khan merupakan sekutu dari Rabbani.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Pada September tahun 1996, Taliban berhasil menguasai Kabul dan membuat Rabbani melarikan diri dan mengungsi ke Iran. Dengan peralatan berat dari militer Taliban, Taliban berhasil memasuki fasilitas PBB di Kabul dan menangkap Najibullah.¹⁷ Ia disiksa dan dibunuh. Mayatnya kemudian digantung di depan istana Presiden.¹⁸

Taliban juga berupaya menguasai Mazar-i-Sharif. Pada tahun 1998, Mazar-i-Sharif berhasil dikuasai oleh Taliban. Taliban membantai pejuang Hazara dan juga membunuh para diplomat Iran. Iran yang merupakan pendukung kelompok Syiah di Mazar-i-Sharif mengecam peristiwa ini. Peristiwa ini membuat hubungan antara rezim Syiah di Teheran dan Taliban yang menganut aliran Sunni semakin memburuk. Taliban yang dibantu oleh prajurit *Al-Qaeda* terus menekan para oposisi hingga tahun 2001.¹⁹

Taliban menetapkan Kabul sebagai ibukota negara dan menetapkan beberapa kementerian, akan tetapi basis pertahanan tetap berada di Kandahar yang dipimpin oleh Mullah Umar. Para senior dan pengikut Taliban yang berada di Pakistan sangat menghormati Mullah Umar. Namun, kekuasaan di Afghanistan tidak diakui oleh mayoritas negara-negara lain, kecuali Pakistan, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Amerika Serikat dan PBB terus memberikan bantuan kepada masyarakat Afghanistan untuk melakukan perlawanan terhadap rezim Taliban.²⁰

Perang Melawan Taliban Pasca Peristiwa 9 September 2001

Pada tanggal 9 September 2001, sebuah peristiwa penting terjadi. Peristiwa tersebut adalah peristiwa runtuhnya gedung *World Trade Center* (WTC) yang merupakan salah satu aset terpenting yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Setelah melalui berbagai tahap penyelidikan, Amerika Serikat menyakini bahwa peristiwa ini terjadi akibat dari aksi terorisme. Taliban kemudian dianggap merupakan pihak yang harus bertanggungjawab atas peristiwa ini. Maka dari itu,

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Joseph J. Collins, *Op.cit*, hal. 38

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Amerika Serikat meminta Osama bin Laden yang merupakan salah satu pemimpin dari Taliban untuk diserahkan agar bisa diadili atas kasus tersebut. Namun, Taliban menolak yang menyebabkan Amerika Serikat memutuskan untuk menyatakan perang terhadap Taliban.²¹ Hal ini menambah jumlah konflik yang terjadi di Afghanistan.

Serangan Amerika Serikat dimulai pada tanggal 7 Oktober tahun 2001. Serangan ini ditata atas nama Operasi *Enduring Freedom*.²² Hingga akhir bulan Oktober, pasukan khusus Amerika Serikat yang juga didukung oleh *Central Intelligence Agency* (CIA) terus menjalin kerjasama dengan kelompok Pashtun yang menjadi sekutu Amerika Serikat di wilayah selatan Afghanistan.²³

Operasi *Enduring Freedom* dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama dimulai sejak bulan Oktober tahun 2001 hingga bulan Maret 2002. Sedangkan tahap kedua dimulai sejak tahap pertama selesai.²⁴ Tahap pertama merupakan tahap dimana Amerika Serikat memahami strategi berperang di Afghanistan. Sebagaimana yang diketahui, Afghanistan merupakan negara yang didominasi oleh gurun pasir dan wilayah pegunungan. Hal ini tentunya menyulitkan militer Amerika Serikat untuk beroperasi di wilayah tersebut. Selanjutnya, tahap kedua merupakan tahap ini dari operasi tersebut. pada tahap ini, Amerika Serikat telah mulai mempelajari medan perang yang ada di Afghanistan. Kemampuan dari Amerika Serikat ini tidak terlepas dari bantuan informasi intelijen dari CIA dan bantuan-bantuan lain yang diberikan oleh kelompok Pashtun yang dikenal dengan sebutan *Northern Alliance*. Kelompok ini terdiri dari gabungan etnis Tajiks, Hazara, Uzbek, dan etnis Pashtun lainnya yang menentang Taliban. Kelompok ini menjadi juga sekutu Amerika Serikat.²⁵

Pertempuran pada tahap pertama diakhiri dengan dilakukannya Operasi *Anaconda*. Ini merupakan operasi militer gabungan antara pasukan militer Amerika Serikat dan Afghanistan. Operasi ini dilakukan

dari tanggal 2 hingga 19 Maret 2002. Operasi militer ini dilakukan di Shah-i-Kot Valley di selatan Gardez yang terletak di Provinsi Paktia. Dalam operasi ini pasukan militer yang pro terhadap pemerintah berhasil merebut salah satu benteng pertahanan terkuat milik Taliban di Afghanistan.²⁶

Dengan kondisi yang semakin tersudut, Osama bin Laden dan sekitar 1.000 pejuang Al-Qaeda serta para petinggi Taliban melarikan diri ke Pakistan dan beberapa negara tetangga.²⁷ Secara keseluruhan, operasi militer Amerika Serikat dinilai berhasil. Rezim Taliban di Afghanistan juga berhasil dihancurkan. Namun, kekalahan-kekalahan yang dialami oleh Taliban tidak menyebabkan mereka kehilangan semangat untuk terus melakukan perlawanan.

Pasca kemenangan Amerika Serikat dan sekutunya di Afghanistan, Amerika Serikat dan sekutunya meminta untuk diadakannya konferensi. Kemudian sebuah konferensi diadakan di kota Bonn, Jerman. Agenda penting pada konferensi ini adalah membentuk pemerintahan baru di Afghanistan. Hasilnya, komunitas internasional menyetujui untuk dibentuknya pemerintahan sementara di Afghanistan tanpa adanya partisipasi dari kelompok Taliban. Hamid Karzai, seorang dari etnis Durrani Pashtun diangkat menjadi Presiden. Mohammad Fahim Khan diangkat menjadi Menteri Pertahanan, Yunus Qanooni diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri, Abdullah Abdullah diangkat menjadi Menteri Luar Negeri.²⁸

Taliban dan kelompok anti-pemerintah lainnya terus menyerang sekolah, guru, dan muridnya. Pada tahun 2009, Kementerian Pendidikan Afghanistan melaporkan bahwa lebih dari 590 sekolah ditutup akibat konflik. Kebanyakan sekolah ini berada di Provinsi Helmand, Zabul, dan Kandahar.²⁹

Selama tahun 2009 hingga 2012, Taliban berusaha merebut kembali kekuasaan di Afghanistan. Hal ini membuat pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat harus terus

²¹ *Ibid.*, hal. 45

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hal. 47

²⁵ Kenneth Katzman, *Op.cit.*, hal. 9

²⁶ *Ibid.*, hal. 9

²⁷ Joseph J. Collins, *Op.cit.*, hal. 49

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ GCPEA, Afghanistan, terdapat pada <http://www.protectingeducation.org/country-profile/afghanistan>, diakses pada 20 Januari 2014, pukul 19.43 WIB

menjaga keamanan di Afghanistan. Hingga akhir 2012, Taliban masih memiliki pengaruh yang kuat di bagian selatan dan timur Afghanistan.

Pada bulan Maret 2009, Presiden Barack Obama mengambil kebijakan untuk meningkatkan tentaranya di Afghanistan hingga mencapai 130.000 personil. Amerika Serikat menyetujui untuk meletakkan tentaranya hingga bulan desember tahun 2014.³⁰

Program Kerja UNAMA di Afghanistan

UNAMA yang bergerak di bidang hak asasi manusia merupakan bidang utama yang mengawasi dan melaksanakan tindakan-tindakan preventif maupun represif apabila terjadi hal yang melanggar hak asasi manusia. UNAMA melakukan segala upaya untuk “menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia di Afghanistan” atau hak asasi manusia setiap saat dan untuk semua orang”. Tim dari UNAMA berupaya melaksanakan strategi ini melalui, subjek, melaporkan, advokasi, dan menjalin kerjasama dengan rekan-rekan kerja serta berdiskusi dengan pemerintah, militer, kelompok masyarakat maupun kelompok internasional. Dalam mencapai tujuannya, UNAMA menetapkan 4 prioritas bidang kerja seperti perlindungan terhadap rakyat sipil, perlindungan wanita dari kekerasan, perdamaian dan rekonsiliasi, dan penahanan.³¹

Perlindungan Terhadap Warga Sipil

UNAMA dan *Afghanistan Independent Human Rights Commission* (AIHRC) menganggap bahwa konflik bersenjata di Afghanistan bukanlah sebuah konflik bersenjata internasional. UNAMA beranggapan bahwa konflik tersebut merupakan konflik yang terjadi antara pemerintah dan pasukan militer internasional yang pro terhadap pemerintah melawan kelompok anti-pemerintah. Kelompok anti-pemerintah terdiri seluruh individu dan kelompok yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, motivasi, dan struktur komando yang pada umumnya berasal dari Kelompok Taliban,

jaringan *Haqqani*, *Hezbi Islami*, dan kelompok *Al-Qaida* seperti Gerakan Uzbekistan, Persatuan Jihad Islam, *Lashkari Taryiba* dan *Jaysh Muhammad*. Seluruh kelompok yang termasuk dalam kelompok pro-pemerintah berkewajiban untuk meminimalisir akibat dari aksi-aksi kelompok anti-pemerintah terhadap populasi warga sipil dan infrastruktur warga sipil.³²

Pasal 3 dari Konvensi Jenewa tahun 1949 menetapkan standar minimum bagi kelompok untuk memahami sebuah konflik bersenjata non-internasional. Pasal 3 juga memperluas hukum humaniter hingga situasi yang melibatkan wilayah yang menjadi kedaulatan sebuah negara dan mengikat tidak hanya negara namun juga aktor non-negara yang terlibat dalam konflik tersebut.

Pada tahun 2009, UNAMA mencatat sebanyak 2.412 warga sipil meninggal. Sebanyak 1630 diantaranya disebabkan oleh kelompok anti-pemerintah dan 596 korban lainnya disebabkan oleh pasukan pro-pemerintah. Sementara itu, sebanyak 186 korban meninggal lainnya meninggal akibat kontak senjata, atau terbunuh karena ledakan. Konflik yang terjadi di Afghanistan terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya.³³

Korban jiwa di tahun 2010 meningkat jika dibanding pada tahun sebelumnya. UNAMA melaporkan bahwa sebanyak 2.777 menjadi korban jiwa selama tahun 2010. Sebanyak 2.080 diantaranya diakibatkan oleh pasukan anti-pemerintah. Pasukan anti-pemerintah menggunakan strategi bom bunuh diri dan pengeboman dengan bom rakitan sebagai strategi utama mereka melawan pemerintah yang menyebabkan 1.141 korban jiwa atau 55 persen dari total korban jiwa yang diakibatkan oleh kelompok anti-pemerintah.³⁴

Selama tahun 2010, hal yang cukup mengkhawatirkan adalah semakin meningkatnya pembunuhan secara diam-diam oleh kelompok anti-pemerintah. Sebanyak 462 warga sipil dibunuh secara diam-diam. Kondisi

³⁰ *Ibid.*

³¹ UNAMA, *Human Rights: Priority Area of Work*, terdapat pada <http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12285&language=en-US>, 26 Januari 2014 pukul 16.30 WIB

³² UNAMA, *Annual Report 2010 on Protection of Civilians in Armed Conflict*, Kabul, 2011, hal. 6

³³ UNAMA, *Annual Report 2009 on Protection of Civilians in Armed Conflict*, Kabul, 2010, hal. 5

³⁴ UNAMA, *Annual Report 2010 on Protection of Civilians in Armed Conflict*, Kabul, 2011, hal. 16

ini meningkat lebih dari 105 persen dibanding dengan tahun 2009. Provinsi Helmand yang terletak di selatan Afghanistan merupakan provinsi yang terkena dampak terbesar dari pembunuhan dengan menggunakan metode ini yang kemudian disusul dengan provinsi Kandahar.³⁵

Di sisi lain, kelompok pro-pemerintah telah menyebabkan 440 korban jiwa atau berkurang sebesar 26 persen dari tahun 2009. Serangan udara diklaim sebagai aksi yang menyebabkan banyak jatuhnya korban jiwa yang diakibatkan oleh pasukan pro pemerintah. Selanjutnya, 9 persen dari total warga sipil yang terbunuh tidak dapat dikaitkan dengan kedua belah pihak, baik kelompok pro-pemerintah maupun anti-pemerintah.³⁶

Kenaikan jumlah korban jiwa pada tahun 2010 disebabkan oleh bom bunuh diri dan pembunuhan secara diam-diam. Walaupun mayoritas konflik terjadi di kawasan selatan Afghanistan, dampak dari konflik terus menyebar ke kawasan utara, timur, dan barat Afghanistan.

Pada tahun 2010, korban luka akibat konflik meningkat sebesar 22 persen dibanding tahun 2009. Sebanyak 4.343 warga sipil terluka dimana 3.366 atau sebesar 78 persen dari total warga sipil yang terluka diakibatkan oleh kelompok anti-pemerintah. 400 warga sipil atau sebesar 9 persen diakibatkan oleh kelompok pro-pemerintah. Hal ini berkurang sebesar 13 persen dari tahun 2009. Sedangkan 577 warga sipil atau sebesar 13 persen dari warga sipil yang terluka, tidak dapat ditentukan kelompok mana yang menyebabkan hal ini.³⁷

UNAMA dan AIHRC berupaya untuk menelusuri pihak yang harus bertanggungjawab atas serangan-serangan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari warga sipil. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dari kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh perang. Hal ini juga berguna agar UNAMA bidang hak asasi manusia juga dapat melakukan

advokasi bagi warga sipil terhadap kelompok-kelompok tertentu.³⁸

Pada bulan Agustus 2010, pemerintah Afghanistan mempromosikan program *Afghanistan Local Police* (ALP). Program ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil dalam skala lokal. ALP melaporkan kegiatannya kepada pemimpin polisi wilayah. ALP dilatih oleh Pasukan Spesial Amerika Serikat. Pelatihan ini akan dilakukan dalam batas waktu tertentu dan selanjutnya akan diserahkan kepada militer nasional Afghanistan. UNAMA bidang hak asasi manusia dan AIHRC juga ikut meninjau pembentukan dan kinerja ALP di beberapa wilayah. Hal ini dibutuhkan untuk melihat dan mengevaluasi kinerja ALP dalam proses rekrutmen, peningkatan kualitas polisi, dan peningkatan kualitas komando.³⁹

Konflik bersenjata telah mengakibatkan banyaknya korban di sepanjang tahun 2010, baik korban meninggal dunia, luka-luka, kehilangan tempat tinggal, kehilangan kebebasan, maupun kehilangan layanan umum seperti layanan kesehatan, makanan, dan pendidikan. Berdasarkan laporan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) tahun 2010, sebanyak 102,658 orang mengungsi akibat konflik.⁴⁰

Konflik bersenjata di Afghanistan terus berlanjut hingga tahun 2011. UNAMA melaporkan bahwa 3.021 warga sipil menjadi korban jiwa di sepanjang tahun 2011. Kondisi ini meningkat sebesar 8 persen jika dibanding tahun 2010.⁴¹

Kelompok anti-pemerintah bertanggungjawab atas kematian 2.332 warga sipil atau meningkat sebesar 14 persen dibanding tahun 2010.⁴² Sedangkan operasi militer yang dilakukan oleh pasukan pro-pemerintah menyebabkan sebanyak 410 warga sipil meninggal atau berkurang sebesar 4 persen dari tahun 2010. Kemudian, sebanyak 279 warga sipil yang meninggal dunia tidak dapat dipastikan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hal. 17

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hal. 20

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 22

⁴¹ UNAMA, *Annual Report 2011 on Protection of Civilians in Armed Conflict*, Kabul, 2012, hal. 16

⁴² *Ibid.*, hal. 16

kelompok mana yang menyebabkan meninggalnya warga tersebut.⁴³

Di sepanjang tahun 2011, kelompok Taliban mengeluarkan beberapa pernyataan publik terkait dengan perlindungan terhadap warga sipil. UNAMA menerima niat baik tersebut namun hal tersebut tentunya harus dibuktikan. Namun terlepas dari pernyataan-pernyataan tersebut, UNAMA menyatakan bahwa Taliban tidak pernah merubah posisinya dalam memberikan perlindungan terhadap warga sipil. Taliban terus menjadikan warga sipil sebagai target langsung dan juga sebagai senjata untuk bom bunuh diri.⁴⁴

UNHCR mencatat sebanyak 185,632 penduduk Afghanistan mengungsi akibat konflik. Berbagai proposal dan ide yang dapat berkontribusi pada negosiasi menuju perdamaian muncul pada awal tahun 2012. UNAMA menghimbau agar seluruh pihak yang terlibat di dalam konflik agar menempatkan perlindungan terhadap warga sipil menjadi prioritas terpenting. UNAMA juga menyatakan bahwa negosiasi menuju perdamaian akan lebih mudah dicapai apabila masing-masing pihak yang terlibat konflik dapat mengurangi korban jiwa dari warga sipil.⁴⁵

Pada tahun 2012, intensitas konflik bersenjata di Afghanistan semakin meningkat. Di sepanjang tahun 2012, UNAMA mencatat sebanyak 7.559 warga sipil menjadi korban. Jumlah ini terdiri dari 2.754 warga sipil meninggal dunia atau berkurang sebesar 12 persen dibanding tahun 2011. Sementara itu, 4.805 warga sipil luka-luka atau meningkat sedikit dibanding dengan tahun 2011. Sepanjang 6 tahun terakhir, UNAMA mencatat sebanyak 14.728 warga sipil Afghanistan telah meninggal dunia akibat konflik bersenjata ini.⁴⁶

Kelompok anti-pemerintah terus menjadikan warga sipil sebagai target mereka. UNAMA mencatat sebanyak 6.131 dari total korban warga sipil di Afghanistan merupakan

korban yang diakibatkan oleh serangan-serangan kelompok anti-pemerintah. Jumlah ini terdiri dari 2.179 korban jiwa dan 3.952 korban luka. Jumlah ini meningkat sebesar 9 persen dari total korban di tahun 2011.⁴⁷

Di sisi lain, pasukan pro-pemerintah telah menyebabkan 587 warga sipil menjadi korban. Jumlah ini terdiri dari 316 korban meninggal dan 271 korban luka-luka. Sementara 841 korban lainnya tidak dapat ditentukan siapa yang bertanggungjawab. Mayoritas dari mereka meninggal akibat kecelakaan selama pertempuran darat, melintasi batas wilayah, atau akibat sisa-sisa ranjau darat.⁴⁸

UNAMA mencatat bahwa kematian dan korban luka dari warga sipil berkurang pada awal tahun 2012. Namun jumlahnya meningkat pada setengah akhir tahun 2012. Faktor kunci yang menyebabkan berkurangnya korban jiwa di lima bulan awal tahun 2012 adalah musim dingin yang sangat luar biasa yang menghambat gerak dari kelompok Taliban dan operasi-operasi militer yang dilakukan oleh kelompok pro-pemerintah.⁴⁹

UNAMA terus menghimbau pemimpin Taliban untuk menghormati hukum humaniter internasional yang melarang menyerang warga sipil dan berhenti menggunakan bom bunuh diri.⁵⁰ Berikut ini grafik korban akibat perang sejak tahun 2010 hingga 2012.

Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan sangat sering terjadi. Kebebasan para perempuan Afghanistan sangat dibatasi, termasuk kemungkinan untuk menikmati hak asasi manusia. Konflik yang berlangsung hampir selama 3 dekade yang diwarnai dengan tidak adanya hukum, ketidakamanan, dan pemerintahan yang lemah telah memberikan dampak yang signifikan terhadap status dan

⁴³ *Ibid.*, hal. 17

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 20

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 22

⁴⁶ UNAMA, *Annual Report 2012 on Protection of Civilians in Armed Conflict*, Kabul, 2013, hal. 16

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 1

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 2

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 3

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 5

situasi perempuan di Afghanistan dalam upayanya mencapai emansipasinya.⁵¹

Selama periode kelompok Mujahidin tahun 1992 hingga 1996, berbagai peperangan terjadi merusak berbagai aspek kehidupan masyarakat Afghanistan. Hak asasi perempuan sangat dibatasi. Bahkan mereka mendapat perlakuan yang tidak wajar seperti dalam bidang hukum, disiksa, mengalami kekerasan seksual, diculik, dipaksa menikah, dan diperdagangkan. Periode ini menggambarkan masa paling kelam dalam sejarah kehidupan perempuan di Afghanistan.⁵²

Kemunculan Taliban justru memperparah kondisi perempuan di Afghanistan. Taliban dengan interpretasinya yang keras dan ideosentris terhadap hukum Syari'ah justru membuat perempuan semakin terpinggirkan. Didasari oleh aturan Islam yang menyimpang, Taliban berupaya menjadikan penguasa mutlak di Afghanistan.

Pada bulan April tahun 2009, juru bicara kelompok Taliban menyatakan bahwa mereka bertanggungjawab atas pembunuhan Sitara Achakzai. Ia adalah seorang anggota dewan perwakilan tingkat provinsi yang berupaya untuk membangkitkan semangat perempuan untuk bekerja dan memperjuangkan hak-hak mereka di Kandahar. Peristiwa ini tentunya mengurangi partisipasi perempuan di parlemen Afghanistan.⁵³

Sejak bulan April hingga Mei 2009, 3 ledakan gas dilaporkan terjadi di berbagai sekolah di Afghanistan. Sebuah ledakan terjadi di provinsi Parwan di bulan April yang menyebabkan anak perempuan banyak yang dilarikan ke rumah sakit karena menghirup bau yang tidak sehat. Beberapa hari setelah itu, ledakan terjadi lagi di Parwan yang menyebabkan 61 murid perempuan dan seorang guru dilarikan ke rumah sakit. Pada bulan Mei, ledakan terjadi di provinsi Kavisa yang menyebabkan 90 murid perempuan yang berumur 8 hingga 12 tahun dilarikan ke rumah sakit akibat gas beracun. Walaupun tidak ada pihak yang dapat bertanggungjawab,

masyarakat Afghanistan meyakini bahwa ini adalah cara baru kelompok Taliban untuk membuat perempuan tidak mendapatkan pendidikan yang layak.⁵⁴

UNAMA terus berupaya untuk mencari solusi terhadap permasalahan perempuan di Afghanistan di sepanjang tahun 2009. Seorang ulama menjelaskan kepada UNAMA bahwa hukum Syari'ah membolehkan wanita untuk bekerja di bidang kesehatan dan pendidikan. Pernyataan ini membuat UNAMA mempunyai dasar untuk menetapkan program-program yang perlu diterapkan di Afghanistan.⁵⁵

Pada bulan Agustus tahun 2009, pemerintah Afghanistan menyepakati *Law on Elimination Violence Against Women (EVAW law)*. EVAW law merupakan kumpulan hukum yang berupaya untuk menghilangkan kebiasaan, tradisi, atau praktek yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap perempuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hukum ini melarang pernikahan kontrak, pernikahan secara paksa, pernikahan sebelum umur, isolasi paksa, larangan perempuan untuk mendapatkan pendidikan, bekerja, dan akses layanan kesehatan, dan praktek-praktek diskriminatif lainnya. EVAW law merupakan langkah besar dalam membuat aturan yang resmi dalam melindungi hak asasi perempuan.⁵⁶

UNAMA bersama dengan para pejuang hak-hak perempuan Afghanistan percaya bahwa peningkatan kesadaran tentang hukum dan upaya dalam menerapkan hukum tersebut secara penuh sangatlah dibutuhkan, terutama mengingat perlunya revisi untuk menyempurnakan hukum tersebut. UNAMA beranggapan bahwa penerapan EVAW law masih belum maksimal dikarenakan masih banyaknya pemerintahan lokal, komunitas, dan pegawai-pegawai pemerintah yang belum mengenalnya.⁵⁷

UNAMA juga mencatat bahwa praktek-praktek tradisional yang sering digunakan oleh Taliban sangat membahayakan dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Terlebih lagi karena

⁵¹ UNAMA, *Silence is Violence : End the Abuse of Women in Afghanistan*, Kabul, 2009, hal. 1

⁵² *Ibid.*, hal. 1

⁵³ *Ibid.*, hal. 12

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 16

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 16

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 7

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 8

Islam mempunyai peran penting dalam konstitusi Afghanistan. UNAMA menyarankan agar pemerintah mengambil peran dalam mempromosikan sebuah interpretasi yang komprehensif terhadap hukum Syari'ah yang menggambarkan bagaimana hak-hak asasi dijamin dalam hukum nasional maupun internasional.⁵⁸

Pelaksanaan EVAW law secara menyeluruh membutuhkan investasi yang sangat besar dalam membangun kapasitas aparat penegak hukum dan menyediakan layanan hukum kepada korban. Kesadaran terhadap efek negatif yang dapat ditimbulkan akibat dari praktek-praktek tradisional yang keras juga diperlukan. Kelompok masyarakat harus didukung dalam mengawasi kegiatan peningkatan kesadaran dan proses advokasi.⁵⁹

Sejak tanggal 21 Maret tahun 2010 hingga tanggal 21 maret tahun 2011, UNAMA dan AIHRC mendaftarkan sekitar 2.299 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dapat dikategorikan ke dalam tindakan kriminal di bawah EVAW law. Hal ini menunjukkan perubahan yang positif dalam upaya penegakan hak asasi perempuan.⁶⁰

Sejak EVAW law diterapkan, 28 provinsi telah membuat cabang-cabang Komisi Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan untuk mendukung pelaksanaan seperti yang telah diamanahkan oleh EVAW law. UNAMA menemukan terdapat 16 komisi yang berfungsi dan bekerja secara rutin dan banyak yang telah membantu dan meningkatkan kesadaran akan hukum. Hampir semua komisi berupaya untuk memenuhi amanahnya dan meminta bantuan tambahan dari Gubernur, Kementerian Urusan Perempuan, dan badan-badan pemerintahan lainnya.⁶¹

UNAMA melakukan lebih dari 261 wawancara di 33 provinsi yang terdiri dari 67 jaksa, 52 polisi, 43 hakim, 45 perwakilan Kementerian Urusan Perempuan dan Departemen Urusan Perempuan provinsi, dan

17 wawancara dengan AIHRC. Wawancara tersebut terkait dengan kasus individu selama tahun 2010 dan 2011. Hal ini dilakukan untuk memperkuat penegakan dari EVAW law.⁶²

Pada tahun 2012, penekanan tentang pentingnya penegakan hak asasi perempuan di Afghanistan semakin kuat. Kondisi ini semakin diperkuat dengan adanya *Tokyo Mutual Accountability Framework* yang diadakan pada bulan Juni 2012. Pada pertemuan ini dibahas mengenai kemajuan dan evaluasi dari EVAW law di Afghanistan. Praktek-praktek kekerasan terhadap perempuan dinilai telah menghalangi perempuan dalam berpartisipasi di kehidupan umum dan menghalangi aspirasi mereka untuk bisa didengarkan dalam forum pembuat kebijakan politik. Kemajuan dalam pelaksanaan EVAW law dapat berkontribusi dalam membuat perempuan bisa memiliki peran yang penting dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi di Afghanistan.⁶³

UNAMA dan AIHRC mencatat terdapat sebanyak 4.010 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dari tanggal 21 maret hingga 21 Oktober 2012. Jumlah ini meningkat dibanding dengan tahun 2011 yang hanya sebanyak 2.299 kasus. Meningkatnya laporan pengaduan kasus ini dapat disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran dan sensitivitas akan kekerasan terhadap perempuan dan konsekuensinya. Pemberian pemahaman akan pentingnya hak asasi perempuan dilakukan melalui kelompok masyarakat, pemerintah, dan aktor internasional.⁶⁴

UNAMA menyatakan bahwa jaksa-jaksa dari 22 provinsi telah berupaya mendaftarkan laporan kekerasan terhadap perempuan. Kondisi ini menunjukkan penungkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dimana jaksa hanya mendaftarkan sebanyak 529 kasus dari 22 provinsi yang sama.⁶⁵ Lebih dari setengah dari total keseluruhan laporan berasal

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ UNAMA, *A Long Way to Go: Implementation of the Elimination of Violence against Women Law in Afghanistan*, Kabul, 2011, hal. 8

⁶¹ Ibid., hal. 9

⁶² Ibid., hal. 6

⁶³ UNAMA, *Still a Long Way to Go: Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan*, Kabul, 2012, hal. 1

⁶⁴ Ibid., hal. 2

⁶⁵ Ibid.

dari dua provinsi yaitu Kabul sebanyak 670 kasus dan Herat sebanyak 333 kasus.⁶⁶

Mayoritas dari komisi di tingkat provinsi masih berupaya untuk memenuhi amanah yang telah diberikan. Mereka membutuhkan dukungan dan perhatian yang lebih baik dari Komisi Tinggi Penghapusan Kekerasan Terhadap perempuan di Kabul untuk membuat mereka lebih efektif dalam menghadapi tantangan dalam menjalankan amanah.⁶⁷ Temuan-temuan UNAMA ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai faktor-faktor kasus kekerasan terhadap perempuan dan membantu dalam peningkatan efektivitas dalam pelatihan mengenai pentingnya kesadaran dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan terjadi.⁶⁸

Perdamaian dan Rekonsiliasi

Sejak jatuhnya rezim Taliban pada tahun 2001, masyarakat Afghanistan berharap peperangan akan berakhir. Namun walaupun aksi-aksi kekerasan semakin berkurang, namun perang belum berakhir. Dimulai pada tahun 2006, situasi keamanan justru semakin memburuk. Sepertiga dari masyarakat Afghanistan terus hidup dalam kondisi kemiskinan dan lebih dari 3 juta masyarakat Afghanistan berstatus pengungsi di Iran dan Pakistan.⁶⁹

Salah satu peran UNAMA dalam menciptakan kondisi yang damai dan kondusif adalah dengan mendukung program *The Afghanistan Peace and Reintegration Program* (APRP). Program ini merupakan program yang dipimpin dan dilaksanakan oleh pemerintah Afghanistan dalam rangka menciptakan perdamaian di Afghanistan. Program ini dimulai dengan adanya dekret Presiden yang dikeluarkan pada bulan Juni tahun 2010.⁷⁰ Para pejuang

yang bergabung dalam program ini akan diminta untuk menghentikan aksi-aksi kekerasan dan mematuhi seluruh hukum yang telah diatur dalam konstitusi Afghanistan.⁷¹

Program APRP mengajak seluruh komunitas lokal untuk bisa bekerjasama dan mengajak para pejuang untuk berhenti berperang dan bergabung kembali dengan komunitas mereka dan mencari solusi atas keluhan mereka. Dengan mendengarkan dan mencari solusi atas keluhan mereka, maka mereka tidak hanya akan berhenti berperang namun juga mereka tidak kembali lagi melakukan aksi-aksi kekerasan.⁷²

UNAMA mendukung terlaksananya proses mobilisasi dan penguatan kelompok masyarakat dan kelompok perempuan. UNAMA bekerja dengan kelompok sosial Afghanistan untuk memperkuat partisipasi mereka dalam diskusi-diskusi mengenai politik, perdamaian, rekonsiliasi, dan reintegrasi.⁷³

UNAMA bersama dengan bidang-bidang lain berupaya memberikan bantuan teknis kepada APRP, Dewan Perdamaian, dan aktor-aktor lain yang terkait. UNAMA untuk menyatukan praktek-praktek hak asasi manusia pada proses perdamaian dan rekonsiliasi.⁷⁴

Perlindungan Terhadap Tahanan

Sejak tahun 2004, Dewan Keamanan PBB telah memberikan mandat kepada UNAMA untuk mendukung penuh upaya pembentukan sistem peradilan yang adil dan transparan, termasuk dalam proses rekonstruksi dan reformasi sektor penjara. Hal ini tentunya juga berguna bagi penguatan supremasi hukum. UNAMA dengan unit hak asasi manusia tersebar di berbagai wilayah di Afghanistan. UNAMA didukung secara teknis oleh *United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR).⁷⁵

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 3

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 5

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Emily Winterbotham, *The State of Transitional Justice in Afghanistan*, Discussion Paper, 2010, hal. 3

⁷⁰ ISAF, *Afghanistan Peace and Reintegration Program*, terdapat pada <http://www.isaf.nato.int/subordinate-commands/afghanistan-peace-and-reintegration-program/index.php>, diakses pada 30 Januari 2014, pukul 19.50 WIB

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ UNAMA, *Human Rights: Priority Area of Work*, *Ibid.*, diakses pada 28 Januari pukul 19.36 WIB

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ UNAMA, *Treatment of Conflict-Related Detainees in Afghan Custody*, Kabul, 2013, hal. 5

Dalam merealisasikan tujuan dan mandat yang telah diberikan, UNAMA melakukan berbagai wawancara dengan para tahanan. UNAMA menggunakan metodologi yang telah memenuhi standar internasional. Seluruh wartawan yang diturunkan oleh UNAMA telah mendapatkan pelatihan dasar, instruksi yang jelas dan panduan kerja dalam menjalankan wawancara. UNAMA juga diwajibkan untuk melindungi informasi-informasi penting terkait dengan penahanan, penyiksaan, dan perawatan yang tidak wajar. Kinerja dari para wartawan ini iawasi dan didukung oleh tenaga ahli dari unit hak asasi manusia UNAMA.⁷⁶

Fokus dari wawancara yang dilakukan oleh UNAMA adalah untuk mengetahui bagaimana perawatan yang dilakukan oleh pegawai NDS, ANP, dan instansi pemerintah lainnya terhadap para tahanan. Perawatan terhadap tahanan diatur dalam hukum hak asasi manusia, baik hukum Afghanistan ataupun hukum internasional. UNAMA tidak terlibat dalam proses hukum yang dijalani oleh para tahanan tersebut.⁷⁷

UNAMA mewawancarai tahanan secara acak dan dengan menggunakan bahasa daerah asal mereka yaitu bahasa Dari atau Pashto. Wawancara ini tanpa dihadiri oleh pegawai penjara, pegawai pemerintahan lainnya, atau pihak-pihak yang tidak berkepentingan lainnya. Sebelum wawancara dilakukan, tahanan juga harus berseia untuk diwawancarai.⁷⁸

Sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2011, UNAMA mewawancarai sebanyak 379 tahanan sebagai sampel. Mereka adalah tahanan dalam masa percobaan dan narapidana pada 47 fasilitas penjara di 22 provinsi di Afghanistan. Sebanyak 324 orang dari total 379 orang yang diwawancarai merupakan tahanan *National Directorate of Security* (NDS) atau *Afghanistan National Police* (ANP). Mereka merupakan tahanan atas kejahatan nasional, tersangka pejuang Taliban, orang yang memfasilitasi serangan bom bunuh diri, produsen bahan peledak rakitan, dan kejahatan-kejahatan lain

yang terkait dengan konflik bersenjata di Afghanistan.⁷⁹ Sebanyak 273 orang tahanan yang diwawancarai merupakan tahanan di fasilitas penjara NDS.⁸⁰

NDS dan ANP merupakan pasukan keamanan utama Afghanistan dalam menangkap dan menahan tahanan perang. NDS bertanggungjawab dalam melakukan investigasi terhadap kejahatan keamanan nasional dan interogasi para tahanan. NDS merupakan badan negara yang mengumpulkan data-data intelijen baik internal maupun eksternal, mempertahankan keamanan, dan melakukan operasi penegakan hukum. Sebagai polisi negara, ANP melakukan baik serangan menangkap pelaku kriminal maupun serangan-serangan terkait konflik. Pasukan militer internasional juga memiliki peran yang signifikan terhadap penahanan individu maupun kelompok yang terlibat konflik.⁸¹

Dari 273 tahanan NDS yang diwawancarai, terdapat sebanyak 125 tahanan yang telah mengalami penyiksaan. Penyiksaan ini terjadi ketika para tahanan diinterogasi oleh para pegawai NDS demi mendapatkan informasi. Pegawai NDS hanya akan berhenti melakukan penyiksaan apabila para tahanan telah mengakui kejahatan yang dituduhkan pada mereka atau NDS telah mendapatkan informasi yang diperlukan. UNAMA bahkan menemukan anak yang masih berusia dibawah 18 tahun yang juga mengalami aksi penyiksaan.⁸²

Para tahanan menggambarkan berbagai macam bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh sipir penjara seperti diikat dengan menggunakan besi dalam jangka waktu tertentu, dicambuk, disetrum dengan menggunakan kawat listrik. Tidak hanya itu, tahanan juga mengakui bahwa mereka disiksa melalui pencabutan kuku kaki, pemukulan di bagian vital, dan diancam akan dilecehkan secara seksual. Para tahanan tidak dapat menikmati layanan kesehatan selama di dalam penjara. UNAMA mencatat terdapat 1 orang meninggal dunia akibat penyiksaan di penjara Kandahar pada bulan April tahun 2011.⁸³

⁷⁶ UNAMA, *Treatment of Conflict Related Detainees in Afghan Custody*, Kabul, 2011, hal. 8

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 12

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 8

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 1

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 7

⁸¹ *Ibid.*, hal. 1

⁸² *Ibid.*, hal. 2

⁸³ *Ibid.*, hal. 3

Pemerintah Afghanistan memiliki kewajiban untuk melarang adanya aksi kekerasan terhadap para tahanan. Hal ini sesuai dengan hukum hak asasi Afghanistan dan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. UNAMA menghimbau seluruh otoritas pemerintah di Afghanistan untuk mengambil langkah-langkah demi mencegah terjadinya aksi-aksi kekerasan.⁸⁴

Kekerasan terhadap para tahanan masih berlanjut hingga periode tahun 2011-2012. Setidaknya, sebanyak 552 tahanan dari total 635 tahanan telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa atas keterlibatan mereka dalam konflik bersenjata di Afghanistan. UNAMA menemukan sebanyak 330 tahanan dari 552 tahanan dari kasus konflik bersenjata diduga merupakan pendukung Taliban, 57 orang diduga sebagai anggota kelompok bersenjata yang anti-pemerintah, 18 orang diduga pelaku penyerangan dan pembunuhan, 13 orang diduga telah berpartisipasi dalam serangan bunuh diri yang gagal, 7 orang diduga pelaku penculikan, 2 orang diduga pelaku pemalsuan data, dan 1 orang pelaku perdagangan manusia serta 19 orang lainnya belum diketahui secara jelas kejahatan apa yang telah dilakukannya.⁸⁵

UNAMA mewawancarai sebanyak 635 tahanan yang dalam masa percobaan dan narapidana yang ditahan oleh ANP, ANBP, ANA, ALP, dan NDS sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2012. Tahanan diwawancarai di fasilitas penjara ANP atau ANBP, markas pusat ANP dan NDS provinsi, penjara *Central Prisons Directorate* (CPD), dan pusat rehabilitasi anak-anak. UNAMA mewawancarai para tahanan di 89 fasilitas di 30 provinsi.⁸⁶

UNAMA mewawancarai 3 orang tahanan perempuan terkait dengan konflik bersenjata. Secara umum, hanya sedikit perempuan yang ditahan oleh otoritas Afghanistan. Tahanan di Afghanistan tidak hanya terdiri dari orang dewasa saja, namun sebanyak 105 anak-anak juga ditahan. Mereka ikut diwawancarai oleh UNAMA. Anak-anak yang ditahan tersebut masih berusia rata-rata di bawah 18 tahun. UNAMA juga mewawancarai

pihak yudisial, jaksa, dewan pertahanan, personil medis, organisasi hak asasi manusia, dan pihak terkait selama periode 2011 hingga 2012 berlangsung.⁸⁷

UNAMA menemukan fakta bahwa sebanyak 377 dari 635 tahanan yang diwawancarai diduga telah mengalami penyiksaan dan perlakuan yang tidak layak.⁸⁸ Penyelidikan lebih lanjut dilakukan dengan melihat luka ataupun bekas luka dari para tahanan, UNAMA meyakini bahwa sebanyak 326 dari 377 tahanan yang diwawancarai telah mengalami penyiksaan dan perlakuan yang tidak wajar selama berada di dalam penjara. UNAMA juga mendapatkan foto sebagai bukti dari para jaksa dan sumber-sumber lainnya.⁸⁹

Selama periode tahun 2011 hingga 2012, UNAMA diberikan akses oleh NDS untuk melakukan peninjauan para tahanan di fasilitas tahanan di seluruh wilayah Afghanistan, kecuali fasilitas penahanan NDS Departemen 124 yang khusus menangani tahanan kejahatan terorisme. Kementerian Dalam Negeri Afghanistan juga memberikan akses ke seluruh fasilitas penahanan ANP dan *Afghanistan National Border Police* (ANBP).⁹⁰

Dalam upaya mengungkap informasi mengenai tahanan, UNAMA berupaya menemui otoritas fasilitas penjara dan pegawai pemerintahan yang terkait untuk dapat mengakses informasi pendaftaran tahanan. Namun, di beberapa fasilitas penjara, UNAMA tidak diberikan akses untuk melihat informasi pendaftaran atau buku catatan kejadian perkara. Dengan bantuan departemen hak asasi manusia Afghanistan, UNAMA diberikan akses untuk melihat buku catatan kejadian perkara di seluruh fasilitas penahanan NDS.

UNAMA berfokus perawatan 635 tahanan oleh personil NDS, ANP, ANBP, ANA, maupun ALP. Setiap tahanan ditanyai mengenai bagaimana perawatan yang mereka dapatkan selama di dalam penjara. UNAMA juga meninjau bagaimana pemenuhan kewajiban pemerintah Afghanistan dalam memberikan jaminan perawatan para tahanan sesuai dengan yang telah diatur dalam hukum hak asasi

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 4

⁸⁵ UNAMA, *Treatment of Conflict-Related Detainees in Afghan Custody*, Kabul, 2013, hal. 6

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 8

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 9

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 10

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 6

manusia Afghanistan maupun hukum internasional. Keselamatan para tahanan merupakan salah satu mandat yang harus dijalankan oleh UNAMA. UNAMA diwajibkan untuk menjamin hak-hak asasi manusia tetap dihormati oleh seluruh pihak di Afghanistan.⁹¹

Kesimpulan

Kondisi konflik di Afghanistan yang berkepanjangan telah menyebabkan banyak kerugian, baik dari segi materi maupun non-materi. Konflik di Afghanistan terjadi akibat adanya perebutan kekuasaan antara kelompok-kelompok masyarakat di Afghanistan. Taliban yang merupakan salah satu kelompok terkuat di Afghanistan berupaya dengan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan di Afghanistan. Aksi-Aksi penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Taliban telah menyebabkan kehancuran di berbagai lini kehidupan di Afghanistan.

UNAMA yang merupakan perpanjangan tangan PBB di Afghanistan telah melakukan berbagai upaya dalam merealisasikan kondisi Afghanistan yang damai dan kondusif. Dalam pencapaian tujuannya, UNAMA bergerak melalui dua bidang kerja, yaitu bidang urusan politik dan bidang urusan pemulihan dan rekonstruksi.

Dalam upaya melindungi hak asasi manusia di Afghanistan, UNAMA membentuk unit khusus untuk hak asasi manusia. Unit ini bekerja hingga ke seluruh wilayah Afghanistan. Sejak keterlibatan UNAMA di Afghanistan, UNAMA telah berupaya keras dalam melindungi hak asasi masyarakat di Afghanistan. Upaya ini dilakukan melalui beberapa cara seperti memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi warga sipil, memberikan perlindungan bagi perempuan, membantu proses rekonstruksi dan rekonsiliasi, serta memberikan perlindungan terhadap kekerasan bagi para tahanan. UNAMA juga telah mendorong pemerintah Afghanistan untuk memperkuat upaya perlindungan hak asasi manusia di Afghanistan sesuai dengan hukum hak asasi manusia, baik hukum nasional Afghanistan maupun hukum internasional.

Di samping itu, UNAMA juga dinilai telah berhasil menarik simpati negara-negara lain untuk ikut membantu dalam pemulihan kondisi di

Afghanistan. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan ISAF, misi-misi kemanusiaan PBB lainnya, dan negara-negara besar sebagai pendonor bagi proses rekonstruksi Afghanistan seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman, serta negara-negara pendonor lainnya untuk bekerjasama dalam memulihkan kondisi di Afghanistan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Clive Archer, *International Organizations*, (London : Routledge, 2001)
- Jill Steans dan Lloyd Pettiford, *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*, terj. Deasy Silvya Sari, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009)
- John Baylis dan Steven Smith, *The Globalization of World Politics; An Introduction to International Relations*, second edition, (New York : Oxford University Press, 2001)
- Joseph J. Collins, *Understanding War in Afghanistan*, (Washington D.C : National Defence University Press, 2011)
- J. Samuel Barkin, *International Organization, Theories and Institution*, (Hampshire : Palgrave Macmillan, 2006)
- Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta : LP3ES, 1990)
- Scott Burchill & Andrew Linklater, *Teori-teori Hubungan Internasional*, (Bandung: Nusa Media, 1996)
- Yoram Dinstein, *War, Aggression and Self-Defence*, Second Edition, (Cambridge University Press: Australia, 1994)

Jurnal:

- Emily Winterbotham, *The State of Transitional Justice in Afghanistan*, Discussion Paper, 2010
- Iselin Hebbert Larsen, *UNAMA in Afghanistan Challenges and Opportunities in Peacemaking : State-building and Coordination*, The Norwegian Institute of International Affairs, 2010
- Kenneth Katzman, *Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy*, CRS Report, 2014

⁹¹ *Ibid.*

- Marjorie Ann Browne, *United Nations System Funding : Congressional Issues*, CRS Report for Congress, 2013
- Rhoda Margesson, *United Nations Assistance Mission in Afghanistan: Background and Policy Issues*, CRS Report for Congress, 2010.
- UNAMA, *A Long Way to Go: Implementation of the Elimination of Violence against Women Law in Afghanistan*, Kabul, 2011
- UNAMA, *Annual Report 2009 on Protection of Civilians in Armed Conflict*, Kabul, 2010
- UNAMA, *Annual Report 2010 on Protection of Civilians in Armed Conflict*, Kabul, 2011
- UNAMA, *Annual Report 2011 on Protection of Civilians in Armed Conflict*, Kabul, 2012
- UNAMA, *Annual Report 2012 on Protection of Civilians in Armed Conflict*, Kabul, 2013
- UNAMA, *Silence is Violence : End the Abuse of Women in Afghanistan*, Kabul, 2009
- UNAMA, *Still a Long Way to Go: Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan*, Kabul, 2012
- UNAMA, *Treatment of Conflict Related Detainees in Afghan Custody*, Kabul, 2011
- UNAMA, *Treatment of Conflict-Related Detainees in Afghan Custody*, Kabul, 2013
- Internet:**
- <http://unama.unmissions.org>
- <http://www.lib.utexas.edu>
- <http://www.insightonconflict.org/conflicts/afghanistan/conflict-profile/>
- <http://www.isaf.nato.int>
- <https://history.state.gov/milestones/1937-1945/un>
- <https://www.un.org>